# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO




EDISI KAMIS. 08 OKTOBER 2026


## RINGKASAN BERITA HARI INI




# CJH Dapat Subsidi Rp 3 Juta Per Orang

## Rata-Rata Bayar Rp 23,2 Juta untuk Lunasi Biaya Haji 2027

**JAKARTA** – Pemerintah memberikan subsidi biaya haji Rp 3 juta per calon jemaah haji (CJH). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, subsidi itu digunakan untuk mengurangi komponen biaya haji di dalam negeri.

Dengan subsidi tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung CJH sebesar Rp 54,6 juta menjadi sekitar Rp 51,6 juta. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan Bipih pada 2026 sebesar Rp 54,1 juta.

Selengkapnya lihat grafis

Sambungan dari Hal 1

"Saya sudah komunikasi dengan Presiden Prabowo. Komponen biaya haji dalam negeri sebesar Rp 5,6 juta disubsidi pemerintah Rp 3 juta," kata Dasco dalam rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 kemarin.

Total BPIH 2027 sebesar Rp 98,4 juta. Naik Rp 11 juta dibandingkan BPIH 2026 sebesar Rp 87,4 jutaan. Dari BPIH 2027 tersebut, komponen nilai manfaat (NM) pengelolaan dana haji menyokong Rp 43,8 jutaan per jemaah atau 44,5 persen. Sementara pada 2026, besaran nilai manfaat Rp 33,2 juta atau 38 persen. (*Selengkapnya lihat grafis*)

Rata-rata para CJH 2027 akan membayar biaya pelunasan Rp 23,2 juta. Sebab, mereka telah membayar setoran awal Rp 25 juta dan punya tabungan hasil investasi dana haji di rekening virtual Rp 3,4 juta.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, subsidi itu tentu meringankan CJH. "Kami tidak menduga ada subsidi," kata politikus PKB itu.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan Dasco atas kebijakan subsidi tersebut. Dalam rapat itu juga dibahas bahwa biaya penerbangan haji sekitar Rp 38,5 juta per jemaah. "Tentu pemerintah menilai bahwa situasi di luar negeri jangan membebani jemaah," tandasnya. **(wan/iun)**



RIVAN AWAL LINGGA/ANTARA FOTO

**KEPUTUSAN BERSAMA:** Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) didampingi Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak pada rapat penetapan BPIH 2027 di Komisi VIII DPR kemarin (7/10).

# Internet Bermasalah, Pemohon Bolak-balik Mal Pelayanan Publik




AHMAD MEZA/JAWA POS

**LAYANAN KEPENDUDUKAN:** Pencetakan KTP elektronik di Mal Pelayanan Publik Sidoarjo sempat terhambat gara-gara gangguan internet.

**SIDOARJO** – Sejumlah warga mengeluhkan layanan pengambilan KTP elektronik (KTP-el) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo selama Senin (5/10)-Selasa (6/10). Pencetakan KTP-el mengalami hambatan gara-gara masalah internet.

Salah satu warga, Kevin mengatakan bahwa dirinya harus bolak-balik ke MPP Sidoarjo gara-gara kartu KTP-el tak kunjung jadi. "KTP saya jadwalnya ngambil itu Senin (5/10). Sewaktu di MPP katanya belum bisa diambil atau ditunda karena trobel dan saya akhirnya pulang," katanya kemarin (7/10).

Warga Candi itu datang lagi ke MPP Selasa (6/10). Di hari kedua itu rupanya KTP-el masih belum dapat diambil. "Kalau memang ada kendala mungkin bisa diberitahukan. Saya juga nggak dikasih estimasi harus ngambil lagi kapan," ujarnya.

Kepala Disdukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, kendala bukan berasal dari mesin pencetak, melainkan gangguan jaringan internet di MPP. Gangguan terjadi sejak Senin dan masih berlangsung hingga Selasa siang. "Hari ini (kemarin) sudah bisa kembali melakukan pencetakan," jelasnya.

Reddy mengatakan, gangguan tersebut berdampak pada pencetakan dokumen administrasi kependudukan yang terkoneksi langsung dengan SIAK yang terpusat. Sehingga bukan hanya pencetakan KTP-el yang terkendala tapi juga KIA. Reddy menyebut jaringan kembali normal pada Selasa (6/10) sekitar pukul 11.00 sehingga proses pencetakan dokumen dapat dilanjutkan. **(eza/hen)**




DWI SAKSMONO/JAWA POS

**MINTA HAK SERTIFIKAT:** Ratusan warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati unjuk rasa di depan BPN Sidoarjo, Rabu (7/10).

# 11 Tahun Menunggu Sertifikat, Warga Pranti Geruduk BPN

### Minta KPK Turun Periksa

**KOTA**-Kesabaran warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati menunggu kepastian sertifikat tanah akhirnya memuncak. Sekitar 300 warga mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, Rabu (7/10) siang, untuk menuntut kejelasan penerbitan sertifikat yang telah mereka tunggu selama 11 tahun.

Massa datang menggunakan sarmotor, dua dump truk, serta puluhan sepeda motor. Mereka berorasi dan membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) segera diselesaikan.

Persoalan tersebut bermula pada 2015. Saat itu, sebanyak 97 warga mengajukan pengurusan sertifikat tanah. Namun, hingga kini, sertifikat yang dinantikan belum juga diterbitkan.

Warga menyebut tanah yang dimiliki merupakan lahan relokasi akibat pembangunan Bandara Internasional Juanda. Karena itu, mereka meminta BPN Sidoarjo memberikan kepastian terkait status dan proses penerbitan sertifikat tersebut.

Salah satu warga Pranti, Ajiz, mengatakan kedatangan warga ke BPN semata-mata untuk memperjuangkan hak atas sertifikat tanah yang telah mereka ajukan sejak 2015.

"Kami datang ke sini untuk menuntut hak kami, yakni sertifikat tanah yang tidak kunjung diterbitkan selama belasan tahun. Hanya itu saja," ujarnya.

Ajiz menegaskan, warga akan kembali menyampaikan aspirasi ke tingkat provinsi apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian.

Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa proses penerbitan sertifikat yang dinilai terlalu lama.

Sementara itu, Kepala Desa Pranti Eko Purnomo mengatakan, dalam pertemuan dengan pihak BPN, warga diminta melengkapi sejumlah dokumen pendukung. Salah satu hal yang perlu diperjelas adalah status

Ke Halaman 10

FENOMENA

# Bangli di FR Waru Disikat

**Sidoarjo - HARIAN BANGSA**

Sebanyak 10 bangunan liar (bangli) di Frontage Road (FR) kawasan Waru dieksekusi kemarin (6/10). Pembongkaran dilakukan mulai ruas FR Desa Kedungrejo, Waru, hingga mendekati Jembatan Sawotratap, Gedangan.

Plt Kabid Tibumtranmas Satpol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno Adi mengatakan, pembongkaran dilakukan setelah pemilik bangli mendapat dua kali surat peringatan (SP) untuk membongkar bangunan secara mandiri. "Ini ada sekitar 10 bangli yang kami tindak. Ada sebanyak 20 bangli lainnya sudah dibongkar secara mandiri selepas SP kedua," katanya.

Penertiban paling banyak dilakukan di ruas FR yang masuk wilayah Desa Kedungrejo atau kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya. Bangunan semi permanen tersebut sebelumnya digunakan untuk berjualan hingga tempat tinggal. Keberadaan bangli dinilai mengganggu lalu lintas dan kebersihan di sekitar jalur FR.

"Keberadaan bangli di jalur penyangga ini mengganggu lalu lintas serta kebersihan di sekitar FR," paparnya. Selain itu, sejumlah bangli berdiri di sebagian lahan *PT KAI yang akan digunakan* untuk pembangunan. **(cat/rus)**



**Petugas dalam pembersihan bangunan liar di Frontage Road (FR) kawasan Waru.**

# Warga Pranti Geruduk BPN, Tuntut Sertifikat Segera Terbit

**SIDOARJO** – Puluhan warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati menggeruduk Kantor BPN Sidoarjo kemarin (7/10). Mereka melakukan aksi demonstrasi dan mendesak BPN segera menerbitkan sertifikat tanah yang sudah diurus sejak 2015.

Salah satu warga Suharto mengatakan, warga datang untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Kesabaran mereka sudah habis. "Kami sudah bayar dan minta sertifikat segera diterbitkan," katanya.

Menurutnya, warga telah memenuhi berbagai kebutuhan administrasi dalam proses pengurusan sertifikat. Mereka juga sudah beberapa kali memperjuangkan persoalan tersebut melalui pertemuan dengan pihak terkait. Namun, hingga kini sertifikat belum diterima.

Kepala Desa Pranti Eko Purnomo menyebut jika warga sudah lama menahan rasa kekecewaan. Dia menyebut, saat ini ada 97 warga yang masuk dalam proses pengurusan sertifikat dari total sekitar 297 warga yang menempati lahan relokasi.

"Kami akan terus berjuang untuk meminta kepastian," katanya. **(ful/hen)**



M. SAIFUL ROHMAN/JAWA POS

**SAMPAIKAN TUNTUTAN:** Warga Pranti berorasi di depan Kantor BPN Sidoarjo dan mendesak agar sertifikat tanah diterbitkan.

# Internet Bermasalah, Pemohon Bolak-balik Mal Pelayanan Publik




AHMAD REZA/JAWA POS

LAYANAN KEPENDUDUKAN: Pencetakan KTP elektronik di Mal Pelayanan Publik Sidoarjo sempat terhambat gara-gara gangguan internet.

**SIDOARJO** – Sejumlah warga mengeluhkan layanan pengambilan KTP elektronik (KTP-el) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo selama Senin (5/10)-Selasa (6/10). Pencetakan KTP-el mengalami hambatan gara-gara masalah internet.

Salah satu warga, Kevin mengatakan bahwa dirinya harus bolak-balik ke MPP Sidoarjo gara-gara kartu KTP-el tak kunjung jadi. "KTP saya jadwalnya ngambil itu Senin (5/10). Sewaktu di MPP katanya belum bisa diambil atau ditunda karena trobel dan saya akhirnya pulang," katanya kemarin (7/10).

Warga Candi itu datang lagi ke MPP Selasa (6/10). Di hari kedua itu rupanya KTP-el masih belum dapat diambil. "Kalau memang ada kendala mungkin bisa diberitahukan. Saya juga nggak dikasih estimasi harus ngambil lagi kapan," ujarnya.

Kepala Disdukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, kendala bukan berasal dari mesin pencetak, melainkan gangguan jaringan internet di MPP. Gangguan terjadi sejak Senin dan masih berlangsung hingga Selasa siang. "Hari ini (kemarin) sudah bisa kembali melakukan pencetakan," jelasnya.

Reddy mengatakan, gangguan tersebut berdampak pada pencetakan dokumen administrasi kependudukan yang terkoneksi langsung dengan SIAK yang terpusat. Sehingga bukan hanya pencetakan KTP-el yang terkendala tapi juga KIA. Reddy menyebut jaringan kembali normal pada Selasa (6/10) sekitar pukul 11.00 sehingga proses pencetakan dokumen dapat dilanjutkan. **(eza/hen)**

Jawa Pos

# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


# Warga Pranti Geruduk BPN, Tuntut Sertifikat Segera Terbit

**SIDOARJO** – Puluhan warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati menggeruduk Kantor BPN Sidoarjo kemarin (7/10). Mereka melakukan aksi demonstrasi dan mendesak BPN segera menerbitkan sertifikat tanah yang sudah diurus sejak 2015.

Salah satu warga Suharto mengatakan, warga datang untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Kesabaran mereka sudah habis. "Kami sudah bayar dan minta sertifikat segera diterbitkan," katanya.

Menurutnya, warga telah memenuhi berbagai kebutuhan administrasi dalam proses pengurusan sertifikat. Mereka juga sudah beberapa kali memperjuangkan persoalan tersebut melalui pertemuan dengan pihak terkait. Namun, hingga kini sertifikat belum diterima.

Kepala Desa Pranti Eko Purnomo menyebut jika warga sudah lama menahan rasa kekecewaan. Dia menyebut, saat ini ada 97 warga yang masuk dalam proses pengurusan sertifikat dari total sekitar 297 warga yang menempati lahan relokasi.

"Kami akan terus berjuang untuk meminta kepastian," katanya. **(ful/hen)**



M. SAIFUL ROHMAN/JAWA POS

**SAMPAIKAN TUNTUTAN:** Warga Pranti berorasi di depan Kantor BPN Sidoarjo dan mendesak agar sertifikat tanah diterbitkan.


Jawa Pos




GRAFIS: HERLAMBANG/JAWA POS

# CJH Dapat Subsidi Rp 3 Juta Per Orang

## Rata-Rata Bayar Rp 23,2 Juta untuk Lunasi Biaya Haji 2027

**JAKARTA** – Pemerintah memberikan subsidi biaya haji Rp 3 juta per calon jemaah haji (CJH). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, subsidi itu digunakan untuk mengurangi komponen biaya haji di dalam negeri.

Dengan subsidi tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung CJH sebesar Rp 54,6 juta menjadi sekitar Rp 51,6 juta. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan Bipih pada 2026 sebesar Rp 54,1 juta ■

Baca CJH Dapat... Hal 2

Jawa Pos

# CJH Dapat Subsidi Rp 3 Juta Per Orang

Sambungan dari **Hal 1**



RIVAN AWAL LINGGA/ANTARA FOTO

**KEPUTUSAN BERSAMA: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) didampingi Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak pada rapat penetapan BPIH 2027 di Komisi VIII DPR kemarin (7/10).**

"Saya sudah komunikasi dengan Presiden Prabowo. Komponen biaya haji dalam negeri sebesar Rp 5,6 juta disubsidi pemerintah Rp 3 juta," kata Dasco dalam rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 kemarin.

Total BPIH 2027 sebesar Rp 98,4 juta. Naik Rp 11 juta dibandingkan BPIH 2026 sebesar Rp 87,4 jutaan. Dari BPIH 2027 tersebut, komponen nilai manfaat (NM) pengelolaan dana haji menyokong Rp 43,8 jutaan per jemaah atau 44,5 persen. Sementara pada 2026, besaran nilai manfaat Rp 33,2 juta atau 38 persen. (*Selengkapnya lihat grafis*)

Rata-rata para CJH 2027 akan membayar biaya pelunasan Rp 23,2 juta. Sebab, mereka telah membayar setoran awal Rp 25 juta dan punya tabungan hasil investasi dana haji di rekening virtual Rp 3,4 juta.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, subsidi itu tentu meringankan CJH. "Kami tidak menduga ada subsidi," kata politikus PKB itu.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan Dasco atas kebijakan subsidi tersebut. Dalam rapat itu juga dibahas bahwa biaya penerbangan haji sekitar Rp 38,5 juta per jemaah. "Tentu pemerintah menilai bahwa situasi di luar negeri jangan membebani jemaah," tandasnya. **(wan/jun)**

**Jawa Pos**

# Kumuh dan Plafon Jebol, Rusunawa Krian Kurang Diminati

## Dari 114 Kamar, Hanya 19 Unit yang Ditempati

**SIDOARJO** – Tarif sewa Rusunawa Tambak Kemerakan atau Rusunawa Krian cukup murah yakni Rp 185 ribu per bulan. Meski begitu, hunian tersebut kurang diminati masyarakat. Dari 114 kamar, hanya 19 unit yang ditempati.

Kondisi bangunan dan lingkungan yang kurang terawat menjadi salah satu alasan rusunawa tersebut belum banyak diminati. Sejumlah kerusakan terlihat pada beberapa bagian bangunan. Plafon kamar ada yang jebol.



> Pencahayaan sekitar rusunawa kami yang menanggung. Saat malam cenderung gelap kalau tidak diisi token."
>
> **Misiadi**
> *Ketua RT 11 RW 3 Rusunawa Tambak Kemerakan*

Sementara, jendela memerlukan perbaikan.

Ketua RT 11 RW 3 Rusunawa Tambak Kemerakan Misiadi mengatakan, kondisi fasilitas menjadi salah satu persoalan yang dirasakan penghuni. Tak hanya bagian dalam kamar. Lingkungan sekitar rusunawa juga tampak kurang terawat dan dipenuhi ilalang.

"Pencahayaan sekitar rusunawa kami yang menanggung. Saat malam cenderung gelap kalau tidak diisi token," ujar Misiadi. Untuk kebutuhan penerangan tersebut, Misiadi menjelaskan bahwa penghuni harus patungan untuk membeli token Rp 750 ribu setiap bulan. Angka tersebut dinilai cukup tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.




ANGGER BONDAN/JAWA POS

**SEPI:** Penghuni mengeluhkan Rusunawa Krian yang kurang terawat. Kondisi jalan juga gelap saat malam hari.




### Renovasi Total

Misiadi berharap pemerintah turun tangan membenahi kondisi rusunawa. Perbaikan fasilitas dan lingkungan penting dilakukan agar warga merasa nyaman. "Kalau begini terus tidak ada yang bersedia masuk dan akan kosong," katanya.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana prihatin melihat bangunan dengan jumlah kamar cukup banyak belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, masih banyak warga Sidoarjo yang membutuhkan tempat tinggal layak. "Banyak yang berminat, tetapi ketika melihat kondisi rusunnya, fasilitasnya belum memenuhi, ya banyak yang nggak mau," ujarnya.

Mimik mendorong pembenahan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada bagian tertentu. "Setelah diperbaiki, warga Kota Delta yang belum memiliki hunian layak bisa menempati rusunawa secara gratis selama satu tahun," katanya. **(ful/hen)**

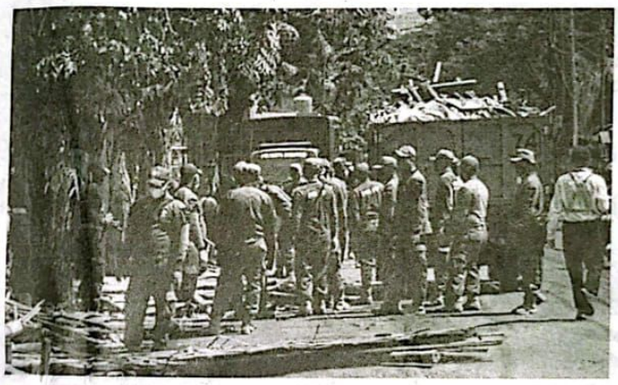
Jawa Pos

## Bangli di FR Waru Disikat

**Sidoarjo - HARIAN BANGSA**

Sebanyak 10 bangunan liar (bangli) di Frontage Road (FR) kawasan Waru dieksekusi kemarin (6/10). Pembongkaran dilakukan mulai ruas FR Desa Kedungrejo, Waru, hingga mendekati Jembatan Sawotratap, Gedangan.

Plt Kabid Tibumtranmas Satpol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno Adi mengatakan, pembongkaran dilakukan setelah pemilik bangli mendapat dua kali surat peringatan (SP) untuk membongkar bangunan secara mandiri. "Ini ada sekitar 10 bangli yang *kami tindak*. Ada sebanyak 20 bangli lainnya sudah dibongkar secara mandiri selepas SP kedua," katanya.



Petugas dalam pembersihan bangunan liar di Frontage Road (FR) kawasan Waru.

Penertiban paling banyak dilakukan di ruas FR yang masuk wilayah Desa Kedungrejo atau kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya. Bangunan semi permanen tersebut sebelumnya digunakan untuk berjualan hingga tempat tinggal. Keberadaan bangli dinilai mengganggu lalu lintas dan kebersihan di sekitar jalur FR.

"Keberadaan bangli di jalur penyangga ini mengganggu lalu lintas serta kebersihan di sekitar FR," paparnya. Selain itu, sejumlah bangli berdiri di sebagian lahan *PT KAI yang akan digunakan* untuk pembangunan. **(cat/rus)**

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

# Jembatan Candinegoro Sidoarjo Dikerjakan 24 Jam

**Sidoarjo – HARIAN BANGSA**

Pembangunan Jembatan Candinegoro di Kabupaten Sidoarjo dikebut untuk mengejar keterlambatan progres fisik. Pelaksana proyek kini menerapkan sistem kerja 24 jam dengan membagi pekerja menjadi dua tim.

Langkah percepatan itu dilakukan setelah progres pembangunan mengalami deviasi minus 9,94 persen. Bupati Sidoarjo Subandi pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pada Selasa (6/10/2026) pagi.

Subandi meminta kontraktor menerapkan minimal dua shift kerja agar keterlambatan bisa dikejar. Dia menargetkan pembangunan jembatan sepanjang 16 meter dan lebar 4 meter tersebut rampung pada Desember 2026.

"PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tadi menyampaikan deviasinya saat ini mencapai 9 persen. Karena ini pengerjaan jembatan, kami menyarankan agar diberlakukan minimal sistem dua shift untuk mengejar deviasi tersebut," kata Subandi dalam keteranganya, Selasa (6/10/2026).



**Bupati Sidoarjo Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek.**

Menurutnya, masih ada waktu sekitar 2,5 bulan untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan. Dia berharap proyek yang mulai dikerjakan pada Juli itu dapat selesai pada 16 Desember 2026.

Subandi juga meminta PPK lebih aktif turun ke lapangan. Koordinasi antara PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor diminta diperkuat untuk memastikan setiap kendala segera ditindaklanjuti. "PPK kita sampaikan untuk sering sidak. Sering koordinasi antara konsultan dengan kontraktor. Kalau ada deviasi, panggil ke kantor. Bicarakan kekurangannya apa untuk segera ditindaklanjuti. Biarkan pelaksanaan pekerjaan jembatan ini tepat waktu," ujarnya.

Subandi menegaskan keterlambatan tidak boleh terus dijadikan alasan untuk tidak mencapai target. Menurutnya, material dan tenaga kerja yang telah disepakati sudah terpenuhi.

Begitu pula dengan kendala teknis berupa aliran air sungai di lokasi pekerjaan. Menurut Subandi, kondisi tersebut seharusnya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

"Tidak bisa beralasan karena air. Sebelum bekerja kan sudah ada perencanaan. Karena itu, saya sampaikan kepada PPK dan konsultan pengawas agar pengawasan diperketat. Jika deviasi 9 persen ini bisa dikejar, saya yakin proyek selesai tepat waktu dan kualitas pekerjaan tetap terjaga," tegasnya.

Sementara itu, Konsultan Pengawas Proyek Jembatan Candinegoro, Umar, mengatakan pengerjaan kini telah memasuki minggu ke-11. Berdasarkan evaluasi per Senin (5/10), progres fisik proyek mencapai 52,64 persen. **(md/rus)**

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO





DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

MINTA HAK SERTIFIKAT: Ratusan warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati unjuk rasa di depan BPN Sidoarjo, Rabu (7/10).

# 11 Tahun Menunggu Sertifikat, Warga Pranti Geruduk BPN

## Minta KPK Turun Periksa

**KOTA**-Kesabaran warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati menunggu kepastian sertifikat tanah akhirnya memuncak. Sekitar 300 warga mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, Rabu (7/10) siang, untuk menuntut kejelasan penerbitan sertifikat yang telah mereka tunggu selama 11 tahun.

Massa datang menggunakan satu mobil komando, dua dump truk, serta puluhan sepeda motor. Mereka berorasi dan membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) segera diselesaikan.

Persoalan tersebut bermula pada 2015. Saat itu, sebanyak 97 warga mengajukan pengurusan sertifikat tanah. Namun, hingga kini, sertifikat yang dinantikan belum juga diterbitkan.

Warga menyebut tanah yang mereka tempati merupakan lahan relokasi akibat pembangunan Bandara Internasional Juanda. Karena itu, mereka meminta BPN Sidoarjo memberikan kepastian terkait status dan proses penerbitan sertifikat tersebut.

FENOMENA

Salah satu warga Pranti, Ajiz, mengatakan kedatangan warga ke BPN semata-mata untuk memperjuangkan hak atas sertifikat tanah yang telah mereka ajukan sejak 2015.

"Kami datang ke sini untuk menuntut hak kami, yakni sertifikat tanah yang tidak kunjung diterbitkan selama belasan tahun. Hanya itu saja," ujarnya.

Ajiz menegaskan, warga akan kembali menyampaikan aspirasi ke tingkat provinsi apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian.

Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa proses penerbitan sertifikat yang dinilai terlalu lama.

Sementara itu, Kepala Desa Pranti Eko Purnomo mengatakan, dalam pertemuan dengan pihak BPN, warga diminta melengkapi sejumlah dokumen pendukung. Salah satu hal yang perlu diperjelas adalah status

● Ke Halaman 10

RADAR SIDOARJO.ID

### 11 Tahun Menunggu...

lahan yang ditempati warga di RT 6 dan RT 7.

Menurut Eko, terdapat klaim dari Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) yang menyebut lahan tersebut merupakan fasilitas umum (fasum). Klaim tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diklarifikasi sebelum proses administrasi sertifikat dapat dilanjutkan.

"Memang BPN secara fungsi kelembagaan hanya untuk administratif. Kami diminta melengkapi dokumen yang ada, dokumen pendukung," katanya.

Untuk memastikan status lahan, Eko bersama warga kemudian mendatangi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo. Mereka ingin memastikan lahan yang ditempati warga ini merupakan fasum sebagaimana klaim yang disebutkan.

"Kami akan ke Perkim dengan massa ini untuk memastikan bahwa tanah kami ini bukan fasum," tegasnya.

Dari 97 pemohon awal, sebanyak 94 warga diketahui menempati lahan di RT 6 dan RT 7. Eko mengaku baru mengetahui adanya klaim lahan tersebut sebagai fasum pada September lalu setelah berkoordinasi dengan pihak BPN.

"Baru saya dengar. Sebelumnya tidak. Setelah kami mendapatkan informasi sekitar 17 September dengan teman-teman BPN, ada klaim bahwa itu adalah fasum sesuai site plan. Tetapi saya bantah bahwa itu bukan fasum, melainkan murni untuk permukiman warga kami," jelasnya.

Eko menambahkan, warga telah berulang kali melakukan koordinasi dan hearing dengan DPRD Sidoarjo. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian konkret terhadap persoalan tersebut.

"Sudah empat kali hearing. Artinya, kami tidak bisa menyebutkan berapa kali, tetapi sudah sering kali kami hearing. Memang belum ada hasil sampai saat ini," ungkapnya.

Karena itu, warga meminta seluruh pihak terkait segera memberikan kepastian mengenai status lahan dan kelengkapan administrasi sertifikat. Mereka berharap persoalan yang telah berlangsung sejak 2015 tersebut dapat segera diselesaikan dan tidak kembali berlarut-larut.

"Kami dengan warga akan tetap ke Perkim. Kami diundang dan akan datang semuanya untuk meminta kejelasan terkait klaim sepihak itu," pungkas Eko. (dik/vga)

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

# Rusunawa Tambak Kemerakan Sepi, 114 Kamar Hanya Dihuni 19 KK

**KRIAN**-Kondisi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, mendapat sorotan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana. Dari total 114 kamar yang tersedia, baru 19 kepala keluarga (KK) yang menempati rusunawa tersebut.

Minimnya penghuni menjadi perhatian karena kebutuhan hunian masyarakat Sidoarjo masih cukup tinggi. Di sisi lain, kondisi sejumlah fasilitas rusunawa dinilai belum memadai. Mulai dari atap yang rusak, lingkungan yang kurang tera-[illegible], hingga persoalan

● Ke Halaman 10

Dipindai dengan CamScanner



IST

**DISOROT: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat meninjau kondisi Rusunawa Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian.**

RADAR SIDOARJO.ID

## Rusunawa Tambak...

ketersediaan air bersih. Mimik Idayana menilai kondisi tersebut sangat disayangkan. Sebab, bangunan rusunawa yang cukup besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

"Eman, bangunan sebesar ini mangkrak dan tidak berpenghuni. Padahal, warga Sidoarjo masih banyak yang membutuhkan tempat hunian," ujar Mimik saat meninjau Rusunawa Tambak Kemerakan, Selasa (6/10).

Seluruh penghuni yang saat ini tinggal di rusunawa tersebut merupakan warga terdampak pembangunan tanggul (bangir) di Desa Mulyodadi Kecamatan[illegible]yu. Sementara itu, sebagian besar unit lainnya masih kosong.

Menurut Mimik, pemerintah daerah perlu segera melakukan pembenahan agar rusunawa tersebut dapat kembali dimanfaatkan. Perbaikan fasilitas diperlukan untuk memastikan calon penghuni mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman.

Ia bahkan mendorong renovasi menyeluruh apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bangunan sudah tidak layak atau berpotensi membahayakan penghuni.

"Kalau bisa, ini harus direnovasi total. Kalau memang ada surat-surat dari pemerintah pusat atau kementerian yang belum diserahkan, itu segera diurus," tegasnya.

Mimik mengatakan, persoalan tersebut akan segera dikomunikasikan dengan Bupati Sidoarjo Subandi. Menurut dia, kondisi rusunawa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan dengan keselamatan penghuni sekaligus kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. "Nanti saya komunikasikan dengan Pak Bupati. Harus segera ada tindakan secepatnya," katanya.

Setelah fasilitas diperbaiki dan bangunan dinyatakan layak, Rusunawa Tambak Kemerakan diharapkan dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh masyarakat Sidoarjo yang membutuhkan tempat tinggal.

Mimik juga mendapat informasi bahwa terdapat masyarakat yang berminat menyewa unit rusunawa. Namun, kondisi fasilitas yang belum memadai menjadi salah satu kendala calon penghuni.

"Informasinya banyak yang memohon untuk menyewa, cuma fasilitasnya kurang memenuhi. Kita lihat sendiri kondisinya, atapnya juga ada yang rusak," ungkapnya.

Ia meminta kerusakan segera ditangani sebelum kondisinya semakin parah dan berpotensi membahayakan penghuni.

"Ini harus dibenahi secara total. Daripada nanti ambruk dan membahayakan, lebih baik segera kita anggarkan," tegas Mimik.

Selain persoalan fisik, aspek administrasi dan pengelolaan rusunawa juga menjadi perhatian. Bangunan tersebut berkaitan dengan program pemerintah pusat melalui kementerian. Karena itu, Pemkab Sidoarjo perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar status dan pengelolaannya jelas.

"Ini pembangunannya dari kementerian. Jangan sampai akhirnya tidak bermanfaat, sia-sia bangunan seperti ini," ujarnya.

Mimik juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pendataan terhadap kondisi seluruh rusunawa di Sidoarjo. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada rusunawa yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Di Sidoarjo ada berapa rusun yang terbengkalai, ini harus ada perhatian dari dinas terkait. Nanti akan kita komunikasikan," katanya.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Misyadi, mengatakan persoalan air bersih di rusunawa mulai teratasi sekitar tiga bulan terakhir. Sebelumnya, penghuni harus mengupayakan pasokan air secara mandiri.

Adapun warga eks Desa Mulyodadi yang menempati rusunawa tersebut dikenakan tarif sewa Rp 185 ribu per KK setiap bulan. **(dik/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID

# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


# Pos Kamling Goes to RT Dekatkan Pelayanan Publik ke Warga Gedangan




Dipindai dengan CamScanner

**BERMANFAAT**: Warga memanfaatkan layanan Pos Kamling Goes to RT di Desa Punggul, Gedangan, Sidoarjo.

**GEDANGAN**-Pelayanan publik tak harus selalu dilakukan di kantor pemerintahan. Polsek Gedangan bersama unsur 3 Pilar Plus menghadirkan berbagai layanan langsung di tengah masyarakat melalui program Pos Kamling Goes to RT dalam ajang Jagad Inovasi Award 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Musala Ar-Roisiah, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Warga dapat mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi tanpa harus mendatangi kantor instansi terkait.

● Ke Halaman 10

RADAR SIDOARJO.ID

**Pos Kamling...**

Kanit Reskrim Polsek Gedangan Iptu Andri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya mendekatkan pelayanan sekaligus memperkuat komunikasi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan dalam satu tempat tanpa harus datang ke kantor masing-masing instansi," ujar Iptu Andri.

Beragam layanan disediakan dalam kegiatan tersebut, antara lain administrasi kependudukan, perpajakan, layanan kesehatan, konsultasi program pemerintah, hingga pengaduan masyarakat.

Polsek Gedangan juga membuka layanan pengaduan, konsultasi hukum, serta pembuatan surat kehilangan.

Warga dapat menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang dihadapi secara langsung kepada unsur 3 Pilar Plus, yang terdiri atas pemerintah kecamatan, Koramil, Polsek, dan pemerintah desa.

Menurut Iptu Andri, keterlibatan lintas instansi diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat.

"Kami ingin pelayanan semakin dekat, mudah diakses, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Selain pelayanan publik, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Iptu Andri berharap keberadaan Pos Kamling Goes to RT dapat memperkuat partisipasi warga dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

"Kami juga mengajak warga berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," pungkasnya. **(sur/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

# Rumah Sakit Ubah Ruang Administrasi Jadi Rawat Inap

## Atasi Lonjakan Pasien Influenza

**SIDOARJO** – Jumlah pasien yang menjalani rawat inap cenderung melonjak sejak September. Untuk mengatasi hal tersebut, RSU Assakinah Medika mengubah tujuh ruang yang sebelumnya digunakan untuk administrasi menjadi ruang rawat inap.

Humas RSU Assakinah Medika Resti Dwi Anitasari mengatakan, penambahan tempat tidur dilakukan karena *jumlah pasien terus meningkat. Dari kapasitas awal* 110 tempat tidur rawat inap, kini ditambah sekitar 20 tempat tidur untuk mengakomodasi pasien. "Meski awalnya perkantoran, ruangan tersebut memenuhi spesifikasi untuk digunakan sebagai ruang rawat inap sementara," katanya kemarin (7/10).

Dari informasi yang dihimpun, peningkatan pasien di RSU Assakinah Medika didominasi kasus influenza. Sejak Senin (5/10), sekitar 80 persen kasus yang ditangani merupakan influenza. Pasien anak-anak menjadi kelompok yang paling banyak datang untuk mendapatkan perawatan.

Pasien datang dengan gejala yang banyak dikeluhkan kayak panasnya tinggi hingga 40 derajat celsius, nyeri otot, pusing, hingga pilek. Selain faktor cuaca, masalah pola hidup bersih dan sehat (PHBS) juga jadi masalah.

Kenaikan pasien yang diduga influenza juga terjadi di RSU Anwar Medika. Direktur RSU Anwar Medika dr Achmad Yudi Arifianto menjelaskan, pasien rawat inap yang sakit flu memang cukup banyak. Itu terjadi mulai September. "Gejalanya sama seperti flu. Semua ditangani secara baik," katanya. **(eza/hen)**



RSU ASSAKINAH MEDIKA

**KASUS NAIK: Sejumlah pasien influenza menjalani rawat inap di RSU Assakinah Medika, Sukodono, Selasa (6/10).**

RADAR SIDOARJO.ID

## DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bansos Terancam Mandek

October 7, 2026 - 54 Views



Progresjatim.com, Sidoarjo- Komisi C DPRD kabupaten Sidoarjo Hearing bersama OPD terkait Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) atas keluhan empat desa bersama tokoh setempat yang ditolak karena pengembang perumahan diwilayahnya tidak menyerahkan PSU ke pemkab sesuai persyaratan akibat bansos atau dana desa, pokir yang selama ini menjadi salah satu sumber dana untuk pembangunan desanya terganjal alias mandek. di ruang rapat komisi lantai II gedung DPRD rabo (7/10/26).

Ir Bacruni Ariyawan MM, Kepala Dinas Perkim kabupaten Sidoarjo, mengatakan, banyaknya laporan yang masuk dinasnya, meliputi PNPB dikarenakan mahalnya biaya, persoalan makam pengembang ta nyediakan sehingga menimbulkan masalah warga sekitar. Hal ini disebabkan karena regulasi yang mengatur atau stite plan dokumen yang


PROGRESJATIM.COM
Jendela Informasi Anda




memenuhi syarat, ia mencontohkan dilapangkannya pengembang hanya menyediakan fasum hanya dua puluh persen dari total lahan yang digunakan, akhirnya terkait makam tidak masuk dalam fasum hingga bermasalah. masih kata Bacruni, berharap ke depan melalui regulasi baru setiap pengembang harus menyediakan fasum seluas empat puluh persen dari total luas lahan. tak hanya itu pria berkacamata yang saat ini menjabat komisaris BPR delta arta, biaya pnpb di nolkan sehingga tidak memberatkan karena imbasnya warga perumahan yang menempati, pintanya kepada dewan khususnya komisi C DPRD yang membidangi masalah tersebut.

Kabag hukum pemkab Sidoarjo Komang, yang aikut dalam Hearing mengaku permasalahan timbul disebabkan karena regulasi yang dirasakan sangat memberatkan bagi pengembang imbasnya warga penghuni perumahan sangat dirugikan karena biayanya mahal. sementara regulasi baru dari yang sebelumnya baru keluar tahun 2026, terkait PSU.

sementara pimpinan rapat Choirul Hidayat ketua komisi C DPRD kabupaten Sidoarjo, kepada audiens mengatakan akan membuat regulasi bersama OPD terkait untuk memudahkan kepala desa mengajukan PSU, sehingga desa atau kelurahan dia berharap akan mendapatkan kembali anggaran seperti bansos, pokir dan bantuan lainnya tidak tersendat seperti selama ini yang dialami empat desa bansosnya tidak bisa keluar karena PSU belum diserahkan ke pemkab karena masalah regulasi

tampak hadir dalam Hearing komisi C DPRD kabupaten Sidoarjo, OPD diantaranya, Dinas Perkim, PUBSDA, Kabag hukum pemkab, bagian aset, dan empat kepala desa bersama tokoh masyarakat yang mewakili ikut hadir bersama wakil rakyat lantai II gedung DPRD kabupaten Sidoarjo. (GUS)


Post Views: 54

PROGRESJATIM.COM
Jendela Informasi Anda

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

# Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait PHK Sepihak

3 menit membaca View : 5

admin
BURUH - 07 Okt 2026



**pena-indonesia.com** – Sidoarjo. Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna memediasi dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dialami oleh Siti Fatimah, buruh PT Surabaya Perdana Rotopack yang telah mengabdi selama 30 tahun.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi D Gedung DPRD Sidoarjo pada Rabu (7/10/2026) tersebut menghadirkan pihak buruh yang didampingi LSM Seven GAB, manajemen dan kuasa hukum perusahaan, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo.

Siti Fatimah mengaku di-PHK tanpa menerima hak pesangon yang sesuai. Ia menolak tuduhan pihak perusahaan yang menyebut dirinya melakukan pelanggaran hingga kehilangan hak pesangon.

"Waktu itu saya di bagian pemesanan bahan produksi. Saya sudah pesan ke supplier, tapi supplier tidak mengirim pesanan karena tunggakan perusahaan masih banyak dan mereka khawatir tidak dibayar," ujar Siti Fatimah di hadapan pimpinan rapat.

Selain persoalan pesangon, Siti Fatimah juga membeberkan indikasi pemalsuan data pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan.

"Saya sudah didaftarkan BPJS, tapi diduga datanya dipalsukan. Gaji riil saya sekitar Rp 9 juta, tetapi yang didaftarkan ke BPJS hanya Rp 2,5 juta. Ini sangat merugikan saya," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Bangun Winarso, menilai tindakan perusahaan jika terbukti merekayasa data pendaftaran BPJS merupakan bentuk pelanggaran hukum. Ia menegaskan posisi DPRD dalam hearing ini adalah mencari solusi terbaik bagi kedua pihak.

"DPRD di sini sebagai penengah untuk mencari win-win solution. Namun, jika ada dugaan rekayasa atau pemalsuan data pendaftaran BPJS oleh perusahaan, itu jelas melanggar aturan dan bisa jadi masalah baru," tegas legislator dari Fraksi PAN tersebut.

Dukungan juga disampaikan anggota Komisi D, H. Tarkit Erdianto. Ia mengimbau agar permasalahan ini dapat diselesaikan kekeluargaan tanpa harus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

"Ayo kita cari kebijakan, tidak perlu sampai ke PHI karena ini menyangkut nasib buruh. Harapan kami

TRENDING #5 Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sidoarjo Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila

PENA INDONESIA
INFORMASI TERKINI UNTUK INDONESIA

Cari sesua

Beranda Nasional Daerah Pemerintahan Politik Hukum dan Kriminal Lainnya Indeks Berita

"Saya masih menanyakan ke pihak perusahaan, besok saya kabari. Karena saya anggap itu di luar permasalahan utama," jawab Akbar.

Dari pihak regulasi, Kabid Tenaga Kerja Disnaker Sidoarjo, Abdul Hakim, mengimbau seluruh pihak agar tetap mengacu pada hukum ketenagakerjaan yang berlaku dalam menyelesaikan perselisihan.

Di akhir rapat, Sekjen LSM Seven GAB, Suryanto, menegaskan bakal melayangkan surat resmi agar DPRD Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pabrik serta mendorong pemeriksaan audit pajak perusahaan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Moch Dhamroni Chudlori, menutup rapat dengan teguran keras. Pihaknya tidak ragu mendorong proses hukum jika ditemukan pelanggaran pidana.

"Kalau pihak perusahaan ini terbukti salah atau melanggar aturan, kita laporkan saja ke Aparat Penegak Hukum (APH), selesai," tegas Dhamroni.(Titi)

# Polemik 411 Fasum Sidoarjo Terbengkalai, Developer Lari Hingga Siteplan Raib

Siska Prestiwati
7 Oct 2026 13:21

TERUPDATE PEMERINTAHAN POLITIK EKONOMI BISNIS 0

28

3 MINUTES READING






Iklan dihapus.
Tampilkan detail

**Sidoarjo (Aksaraindonesia.id)** – Timbunan masalah penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan di Kabupaten Sidoarjo memicu polemik pelik. Komisi C DPRD Sidoarjo mencatat, dari 550 total kawasan perumahan, Pemkab Sidoarjo baru menerima serah terima 139 PSU. Artinya, sebanyak 411 PSU fasum-fasos masih tertahan dan belum beralih status kepemilikannya ke daerah. Cari Ensiklopedia

Temukan lebih banyak

- Info Regulasi
- Baca Isu Politik
- Cari Buku Islam

**Related posts**

Hari Jadi ke – 2th GADISku, Kadinsos Jatim Dorong Kemandirian Difabel Lewat Koperasi Kodifa Jawara

The Creative Expedition Behind the Series: SMP Al Muslim Jawa Timur Eksplorasi Animasi dan Dubbing di Mocca Studio

Polisi Cek Sungai, Aktivitas Tambang Ditunda

Momen Humanis Polwan Polresta Sidoarjo Bantu Pemudik Disabilitas Naik Bus di Terminal Purabaya

Persoalan ini kian gawat lantaran ditemukannya deretan pengembang (developer) nakal yang kabur tanpa jejak hingga hilangnya dokumen siteplan perumahan. Kondisi tersebut terungkap usai Komisi C menggelar rapat kerja bersama jajaran instansi terkait serta perwakilan pengembang di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (7/10/2026).



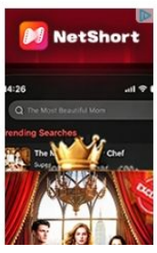
Read Also
**Situasi Alor Terkendali: Polres Berkomitmen Tuntaskan Kasus Tawuran**
19 SEP 2025

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat menegaskan bahwa

AKSARA INDONESIA.ID

HOME NASIONAL TERUPDATE PEMERINTAHAN POLITIK HUKUM PENDIDIKAN KESEHATAN INDEK

Patroli






# Aturan Sound Horeg Digodok DPRD Sidoarjo, Pro-Kontra Bakal Diakomodasi

Siska Prestiwati
7 Oct 2026 14:08

TERUPDATE PEMERINTAHAN POLITIK HIBURAN 0 31

2 MINUTES READING




**Sidoarjo (Aksaraindonesia.id)** – Fenomena sound horeg yang kian marak dan memicu pro-kontra di tengah masyarakat kini mulai masuk meja pembahasan legislator Sidoarjo. Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Sidoarjo resmi menggodok regulasi terkait penggunaan sound system berdaya besar tersebut melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas Linmas). Cari Peta Wilayah

25 SEP 2025

Ketua Pansus 4 DPRD Sidoarjo, Vike Widya Asroni, menjelaskan pembahasan mengenai sound system akan melihat berbagai aspek pendukung dalam suatu pertunjukan, termasuk hiburan visual dan penampilan pengisi acara.

"Jadi bukan hanya sound atau suaranya saja, tetapi juga visualnya, dancer-nya, dan sebagainya. Nanti apakah bentuknya penertiban atau memang ada pelarangan, sementara kita masih merujuk pada aturan yang ada," ujar Vike kepada wartawan seusai rapat.







**Related posts**

BPPD Sidoarjo Optimistis Target PAD dari Reklame Naik Jadi Rp 20,1 Miliar

Prolanis Jadi Solusi Tekan Lonjakan Kasus Diabetes dan Hipertensi di Sidoarjo

Wabup Sidoarjo Kecewa Proyek Rumah Pompa Lambat: Tak Selesai, Blacklist!

Raperda Pesantren Diharapkan Jadi Solusi Biaya Santri Korban Perceraian di Sidoarjo

Terobosan Program Ketahanan Pangan Luncurkan KTSM Semeru

Bisnis Satwa Internasional Diungkap, Pelaku dari Sidoarjo Ditangkap



**Temukan lebih banyak**

Info Regulasi >

Baca Isu Politik >

Cari Buku Islam >


Politikus PKS tersebut menambahkan, Pansus 4 berencana menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat serta para pelaku industri hiburan sebelum memfinalisasi draft Raperda.




Read Also
**Puluhan Siswa Siswi TK Hasjim Ashari PP SedatiLakukan Outing Class ke BPR Delta Artha**
30 SEP 2025


"Harusnya pengusaha-pengusaha sound system juga diundang untuk memberikan masukan," tutur Vike.

Meski isu sound horeg menyedot perhatian publik, Vike menekankan penataan sound system merupakan satu dari belasan aspek yang diatur dalam Raperda Tibumtranmas Linmas.







AKSARA INDONESIA.ID

HOME NASIONAL TERUPDATE PEMERINTAHAN POLITIK HUKUM PENDIDIKAN KESEHATAN INDEKS


jalanan.

" Sound system masih salah satunya, l
Raperda Tibumtranmas ini," kata Vike.

Fenomena maraknya penggunaan so
terkonsentrasi di beberapa titik wilaya
kawasan Tanggulangin dan Candi.

"Memang pemakaian sound system cukup marak juga di Sidoarjo, terutama di daerah Tanggulangin, Candi, dan wilayah pinggiran kabupaten lainnya," ungkapnya.

Menyadari regulasi ini dapat memicu dinamika di tengah masyarakat, Pansus 4 berkomitmen untuk berhati-hati dan mengkaji setiap masukan secara komprehensif.

"Kalau ada peraturan yang dikeluarkan pemerintah, pasti akan ada pro dan kontra. Karena itu, kami masih melakukan pembahasan dan mendengarkan berbagai masukan," tegas Vike. Cek Layanan




# Komisi C DPRD Sidoarjo Bongkar Masalah 411 PSU, Developer Hilang hingga Siteplan Tak Ada

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Syaiful Hidayat
Rabu, 7 Oktober 2026 13:16 WIB

Admin - Author Cari Peta Wilayah
Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:16 WIB



jatim.com Daerah Pemerintahan dan Kebijakan Politik Nasional Hukum Kesehatan Seni Buday



Komisi C DPRD Sidoarjo Bongkar Masalah 411 PSU, Developer Hilang hingga Siteplan Tak Ada. (Dok. Syaiful)

A A A

## Berita Terkait

Sambut Hari Jadi Jatim ke-81, Gubernur Khofifah Hadirkan Servis Gratis 8.100 Motor

Pansus DPRD Sidoarjo Kaji Aturan Sound Horeg, Visual hingga Aktivitas Pertunjukan Disorot

Komisi D DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Pesantren, Ada 3 Bidang yang Difasilitasi

Grahadi Bergemuruh! Wagub Emil dan Ribuan Warga Rayakan Timnas Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Peringatan HUT ke-81 TNI, Gubernur Khofifah Apresiasi Pengabdian Prajurit Jaga Kedaulatan

**Sidoarjo** – Komisi C DPRD Sidoarjo menyoroti masih banyaknya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang belum diserahkan pengembang (developer) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Dari total 550 PSU, baru 139 yang diserahkan.

Temukan lebih banyak
Info Regulasi
Baca Isu Politik
Cari Buku Islam

Hal itu terungkap dalam rapat Komisi C DPRD Sidoarjo bersama sejumlah perwakilan pengembang (developer) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di ruang rapat Komisi DPRD Sidoarjo, Rabu (7/10/2026) siang..